

Kinerja Penegakan HAM Stagnan

KOMNAS HAM tidak menampik bahwa kondisi perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM selama 2017 di Tanah Air belum mengalami kemajuan. Penyebabnya ialah belum ada keinginan dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai kasus tersebut, khususnya pelanggaran HAM berat yang hasil penyelidikannya sudah diserahkan Komnas HAM ke Korps Adhyaksa.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya berupaya menuntaskan sejumlah tugas terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Ia pun berharap pemerintah responsif dan bersedia campur tangan guna menjaga asa publik atas sejumlah pengaduan yang sudah disampaikan.

Menurut dia, ada beberapa gambaran tantangan secara umum mengenai kondisi hak asasi manusia yang menjadi prioritas Komnas HAM. Pertama, penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum ataupun setelah diterbitkannya UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penyelidikan Komnas HAM yang belum ditindaklanjuti antara lain penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, peristiwa Mei 1998, peristiwa penghilangan orang secara paksa, kasus Talangsari, Wamena, Wasior, Jambu Keupok, dan peristiwa Simpang KKA.

Komnas HAM pun berharap pemerintah responsif dan bersedia campur tangan guna menjaga asa publik.

Kedua, terkait dengan kasus ke-kerasan di Papua. Perjalanan sejarah kehidupan masyarakat di tanah Papua sarat dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM. Bahkan, ketidakpuasan masyarakat di sana sebagai akibat berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai diskriminatif justru berdampak pada munculnya gejala penolakan.

Sejumlah pihak meyakini bahwa akar permasalahan yang melandasi menguatnya perlawanan dari beberapa kelompok masyarakat karena ketiadaan proses penyelesaian yang adil.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2018 juga dikhawatirkan banyak menimbulkan benturan dan pelanggaran HAM yang dihadapi pemerintah ataupun masyarakat, seperti sebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang menghiasi suasana pesta demokrasi.

“Berkaca dari pengalaman pilkada DKI Jakarta yang sarat dengan nuansa SARA, maka pada pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah juga akan berpotensi menggunakan praktik SARA yang antara lain menggunakan isu agama, putra daerah, dan sebagainya.”

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menambahkan Komnas HAM menerima banyak pengaduan masyarakat. Ada beberapa tipologi pengaduan yang mendapat atensi.

Pertama, lambannya penanganan laporan polisi yang menyangkut perkara dengan 398 aduan. Kedua, upaya paksa kepolisian yang dilakukan secara sewenang-wenang, yakni 44 aduan. (Gol/P-2)